

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2012 Kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, Jumat (19 April 2013) – Bupati Sumba Barat Daya, **Kornelius Kodi Mete** menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, **B. Dwita Pradana** yang disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, **Yoseph Malo Lende** di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang.

Penyerahan Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang, terutama Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa sebelum disampaikan kepada DPRD, Laporan Keuangan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan akan memeriksa dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk memberikan opini, apakah laporan keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan secara wajar dalam hal yang material dan memenuhi empat kriteria yaitu:

1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan entitas ketiga setelah Pemerintah Kabupaten Ngada dan Pemerintah Kota Kupang dari 22 entitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan amanat undang-undang untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Opini LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2008-2011	
Tahun Anggaran	Opini
2008	Wajar Dengan Pengecualian
2009	Tidak Memberi Pendapat
2010	Wajar Dengan Pengecualian
2011	Wajar Dengan Pengecualian

Informasi lebih lanjut:

Sdr. Erwin Wahyutrianto, S.H. (Kasubag Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi NTT)
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : E.Wahyutrianto@bpk.go.id